



Studi Historis Tentang Krisis Kepemimpinan Pasca Wafatnya Nabi Muhammad Saw

INFO PENULIS

Zahra Kusuma Wardana
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
zahrakusumawardana726@gmail.com

Ahmad Maftuh Sujana
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
maftuhsujana@gmail.com

Reza Dwi Rahmah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
rezadwirhah@gmail.com

Neng Lia Setiawati
universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
liasetiawati785@gmail.com

Hilyatun Nisa
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
hilyatunnisa426@gmail.com

Keysa Olivia Ramadanti
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
keysaoliviaramadanti@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307

Vol. 5, No. 3, Desember 2025

<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fathuurrahmaan, A. (2025). Analisis Kebijakan Meso Uji Kelayakan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4575-4581.

Abstrak

Krisis kepemimpinan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah Islam karena menjadi titik awal terbentuknya sistem kekhalifahan sekaligus lahirnya berbagai perbedaan politik dan teologis dalam tubuh umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab munculnya krisis tersebut, proses penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, serta dampaknya terhadap dinamika sosial-politik umat Islam dan lahirnya berbagai sekte seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur klasik dan modern serta menganalisis hubungan antara krisis suksesi dan perkembangan teologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan dipicu oleh ketiadaan ketentuan eksplisit tentang suksesi, perbedaan pandangan antara Muhajirin dan Anshar, dinamika tribal, serta perbedaan konsep legitimasi kepemimpinan. Proses penunjukan Abu Bakar melalui musyawarah di Saqifah menjadi model awal kepemimpinan politik Islam, namun juga menyisakan ketegangan yang kemudian

melahirkan polarisasi politik. Konflik antara kelompok pendukung Ali, pendukung konsensus sahabat, dan kelompok ekstrem Khawarij berkembang menjadi perpecahan teologis yang memengaruhi pembentukan mazhab dan aliran dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis pasca wafatnya Nabi tidak hanya bersifat politis, tetapi juga menjadi fondasi bagi keragaman pemikiran Islam sekaligus sumber konflik internal yang terus berlanjut hingga masa kini.

Kata Kunci: historis, krisis, kepemimpinan.

Abstract

The leadership crisis that occurred after the death of the Prophet Muhammad (peace be upon him) was one of the most crucial events in Islamic history because it marked the starting point for the formation of the caliphate system and the emergence of various political and theological differences within the Muslim community. This study aims to examine the factors that caused this crisis, the process of appointing Abu Bakr as the first caliph, and its impact on the socio-political dynamics of the Muslim community and the emergence of various sects such as Sunni, Shia, and Khawarij. Using a qualitative method with a library study approach, this study examines classical and modern literature and analyzes the relationship between the succession crisis and the development of Islamic theology. The results show that the leadership crisis was triggered by the lack of explicit provisions on succession, differences of opinion between the Muhajirin and Ansar, tribal dynamics, and differences in the concept of leadership legitimacy. The process of appointing Abu Bakr through deliberation at Saqifah became an early model of Islamic political leadership, but also left tensions that later gave rise to political polarization. The conflict between the group supporting Ali, supporters of the consensus of the companions, and the extreme Khawarij group developed into a theological schism that influenced the formation of schools of thought and sects within Islam. This study concludes that the crisis after the Prophet's death was not only political in nature, but also became the foundation for the diversity of Islamic thought as well as a source of internal conflict that continues to the present day.

Keywords: history, crisis, leadership.

A. Pendahuluan

Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M merupakan titik krusial dalam sejarah Islam. Selain meninggalkan kekosongan spiritual, peristiwa tersebut juga memunculkan persoalan besar mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk memimpin umat. Selama hidupnya, Nabi bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik, militer, dan sosial, sehingga transisi kekuasaan setelah beliau wafat tidak memiliki model atau aturan baku yang dapat dijadikan pedoman (Rahmatullah, 2014).

Dalam situasi mendesak itu, para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan pemimpin baru. Perdebatan muncul antara kelompok Anshar dan Muhajirin mengenai kriteria dan siapa yang paling layak memimpin. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa umat Islam masih mencari bentuk sistem politik yang tepat setelah kehilangan figur pemimpin utama. Musyawarah yang terjadi akhirnya menghasilkan *bai'at* kepada Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah pertama (Yunus, 2016).

Namun, krisis kepemimpinan tidak hanya berhenti pada penentuan pemimpin, tetapi juga melahirkan dinamika politik yang panjang. Perbedaan pandangan mengenai suksesi, otoritas, dan legitimasi menjadi faktor yang ikut membentuk konflik pada masa berikutnya, termasuk munculnya kelompok-kelompok politik awal dalam Islam. Hal ini memberi gambaran bahwa transisi kepemimpinan pasca-wafat Nabi tidak sekadar persoalan memilih pengganti, melainkan juga proses pembentukan sistem pemerintahan baru dalam komunitas Muslim. Namun, krisis kepemimpinan tidak hanya berhenti pada penentuan pemimpin, tetapi juga melahirkan dinamika politik yang panjang. Perbedaan pandangan mengenai suksesi, otoritas, dan legitimasi menjadi faktor yang ikut membentuk konflik pada masa berikutnya, termasuk munculnya kelompok-kelompok politik awal dalam Islam. Hal ini memberi gambaran bahwa transisi kepemimpinan pasca-wafat Nabi tidak sekadar persoalan memilih pengganti, melainkan juga proses pembentukan sistem pemerintahan baru dalam komunitas Muslim (Saputra, 2019).

Selain itu, berbagai studi sejarah menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan ini turut

berpengaruh terhadap pola hubungan antar-sahabat, dinamika sosial-politik, hingga melahirkan berbagai pendekatan baru dalam memahami konsep kekhalifahan. Pandangan modern melihat periode ini sebagai contoh penting dalam studi kepemimpinan, terutama dalam masyarakat yang baru mengalami perubahan besar. Analisis mendalam terhadap sumber sejarah memungkinkan kita memahami akar perbedaan politik dalam Islam serta pembelajaran tentang resolusi konflik dan legitimasi kekuasaan (Subhani et al., 2023).

Kepemimpinan dalam Islam memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan spiritual umat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi situasi genting yang dikenal sebagai krisis kepemimpinan. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya masa kenabian, tetapi juga menjadi titik awal bagi munculnya persoalan legitimasi kekuasaan dalam sejarah Islam. Masa transisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang berhak memimpin umat dan bagaimana sistem kepemimpinan ideal dalam Islam seharusnya dibangun.

Kajian mengenai krisis kepemimpinan pasca wafatnya Nabi telah banyak dilakukan oleh sejarawan Islam, baik klasik maupun modern. Sejarawan klasik seperti al-Tabari dan al-Mas'udi menulis kronologi peristiwa politik awal Islam secara naratif, menekankan pada proses pemilihan Abu Bakar ash-Shiddiq di Saqifah Bani Sa'idah sebagai khalifah pertama. Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah juga menyoroti aspek moral dan spiritual para sahabat dalam menjaga keutuhan umat. Sementara itu, sejarawan modern seperti Wilferd Madelung dalam *The Succession to Muhammad* (1997) mengkritisi proses suksesi tersebut dengan analisis politik yang lebih tajam, menyoroti adanya ketegangan antara prinsip musyawarah (shura) dan loyalitas kekerabatan. Fred M. Donner dan Azyumardi Azra pun menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan titik krusial dalam pembentukan identitas politik Islam awal dan awal dari diferensiasi *Sunni-Syiah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas kajian terdahulu masih menekankan aspek deskriptif-historis, yaitu pada kronologi dan tokoh-tokoh yang terlibat, namun belum banyak yang menelaah krisis ini secara analitis-konseptual dengan menggabungkan teori modern seperti Teori Konflik Sosial (Lewis Coser) dan Teori Legitimasi Kekuasaan (Max Weber). Oleh karena itu, kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan historis klasik dengan teori-teori sosiologis modern guna memahami akar konflik dan dinamika legitimasi kekuasaan pada masa awal Islam.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup lima hal: (1) faktor utama yang menyebabkan munculnya krisis kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, (2) proses penunjukan khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, berlangsung di kalangan sahabat Nabi (3) pengaruh proses penunjukan khalifah tersebut terhadap dinamika politik dan sosial umat Islam pada masa awal (4) perbedaan pandangan terhadap kepemimpinan Islam memicu munculnya konflik dan perpecahan di kalangan umat (5) dampak jangka panjang dari krisis kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap munculnya berbagai sekte dan aliran dalam Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara komprehensif kronologi dan konteks politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, menganalisis mekanisme suksesi kepemimpinan pada masa awal Islam, serta menjelaskan bagaimana krisis tersebut menjadi akar terbentuknya sistem kekhalifahan sekaligus memunculkan perpecahan teologis dan politik dalam sejarah Islam.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema krisis kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW serta dampaknya terhadap munculnya sekte dan aliran dalam Islam. Studi pustaka dipilih karena isu yang diteliti merupakan fenomena historis-teologis yang jejaknya dapat dilacak melalui literatur klasik maupun penelitian modern.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengumpulan sumber untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait peristiwa politik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, sumber-sumber tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema seperti suksesi kepemimpinan, konflik politik, lahirnya sekte, dan perkembangan ilmu kalam. Ketiga, peneliti melakukan analisis isi (content analysis) guna mengidentifikasi hubungan antara krisis kepemimpinan dan munculnya kelompok-kelompok dalam Islam. Keempat, peneliti melakukan

sintesis untuk menarik kesimpulan yang bersifat interpretatif sesuai karakteristik penelitian kualitatif.

Metode studi pustaka memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam melalui sumber ilmiah yang kredibel serta memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak jangka panjang krisis kepemimpinan dalam sejarah Islam. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena topik yang diteliti berkaitan erat dengan dinamika pemikiran, interpretasi historis, dan perkembangan aliran teologi Islam yang tercatat dalam berbagai karya ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut (Harianto, 2023) Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi vakum kepemimpinan politik yang segera menimbulkan urgensi menentukan pengganti (khalifah). Ketidakhadiran satu ketentuan tertulis yang eksplisit tentang mekanisme suksesi (siapa dan bagaimana dipilih) memperbesar peluang perbedaan interpretasi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Madinah, terutama antara kaum *Muhajirîn* (pendatang Mekah) dan kaum *Anshar* (penduduk Madinah). Faktor kedua adalah konteks sosial-tribal dan kepentingan politik: struktur sosial Arab kala itu masih sangat dipengaruhi loyalitas kabilah dan kepentingan kelompok. Dalam konteks *Saqifah Bani Sa'idah*, dinamika cepat pengambilan keputusan (oleh sebagian pemimpin Muhajirîn dan Anshar) menimbulkan kontroversi karena beberapa pihak merasa hak mereka belum diperhitungkan secara adil (Rahmatullah, 2014). Faktor ketiga adalah perbedaan pembacaan terhadap kriteria kepemimpinan apakah kepemimpinan politik harus berdasarkan musyawarah pilihan (shura/praktik konsensus) atau adanya klaim hak berdasarkan kekerabatan (mis. kedekatan keluarga Nabi/ Fatimah-Ali). Perbedaan pembacaan ini kemudian membuka ruang legitimasi alternatif (klaim yang lebih bersifat personal/keturunan versus klaim berdasarkan komunitas/pengakuan luas). Faktor keempat adalah emosi kolektif dan trauma kehilangan wafatnya Nabi menimbulkan kondisi emosional akut sehingga proses politik berjalan cepat dan kadang kurang prosedural; kondisi ini memperbesar salah paham, kecurigaan, dan reaksi berlebihan yang memicu polarisasi. Jadi krisis ini terjadi karena kombinasi vakum aturan suksesi, tekanan tribal/power politics, perbedaan kriteria kepemimpinan, dan suasana emosional pasca-kehilangan pemimpin besar.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami situasi yang genting karena tidak ada lagi pemimpin yang memimpin mereka. Para sahabat segera berkumpul di *Saqifah Bani Sa'idah* untuk membahas dan menentukan siapa yang layak menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat. Dalam pertemuan ini, kaum *Anṣār* mengajukan Sa'd bin 'Ubadah sebagai calon pemimpin, sementara *Muhājirîn* berpendapat bahwa sebaiknya kepemimpinan dipegang oleh mereka yang lebih dahulu memeluk Islam dan memiliki kedekatan khusus dengan Nabi, seperti Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar sendiri tampil sebagai sosok penengah yang mengingatkan pentingnya keutamaan *Muhājirîn*, tetapi tetap menghargai kontribusi besar dari kaum *Anṣār* (Rahmatullah, 2014).

Diskusi di Saqifah berlangsung cukup ketat dan penuh ketegangan karena masing-masing pihak menginginkan yang terbaik bagi umat Islam. Namun, titik balik terjadi ketika Umar bin Khattab secara spontan berdiri dan membai'at Abu Bakar sebagai tanda dukungan penuh. Tindakan ini kemudian diikuti oleh para sahabat lain sehingga terciptalah *bai'at* awal yang menandai pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama di Saqifah. Keesokan harinya, dilaksanakan *bai'at* umum di Masjid Nabawi yang dihadiri oleh banyak sahabat dari berbagai golongan, sehingga legitimasi kepemimpinan Abu Bakar semakin kuat secara sosial dan politik (Yani, 2022).

Proses ini mencerminkan bagaimana umat Islam pada masa itu berhasil menghadapi krisis kepemimpinan melalui musyawarah, dialog, dan kesepakatan bersama. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama tidak hanya menjaga stabilitas umat, tetapi juga menjadi contoh awal bagaimana kepemimpinan dalam Islam dibentuk dengan prinsip musyawarah dan persatuan, di tengah tantangan sosial dan politik pascawafatnya Nabi Muhammad SAW.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam dihadapkan pada persoalan penting terkait penentuan pemimpin baru. Tidak adanya penunjukan langsung dari Nabi mengenai penerus kepemimpinan membuat kondisi politik menjadi sensitif dan rentan terhadap perpecahan. Wilayah Islam yang telah berkembang luas pun terancam kehilangan stabilitas, apalagi dengan adanya tekanan dari kekuatan luar seperti Romawi dan Persia. Situasi ini memicu dinamika politik yang cukup kuat di kalangan para sahabat.

Peristiwa Tsaqifah menjadi contoh awal munculnya ketegangan politik antara kaum Anshar dan Muhajirin. Kaum Anshar merasa berhak mengajukan calon pemimpin karena kontribusi

mereka dalam menopang komunitas Muslim sejak awal kedatangan Nabi ke Madinah. Di sisi lain, kelompok *Muhajirin* yang dipimpin Abu Bakar dan Umar menyatakan bahwa kepemimpinan seharusnya berada pada kaum *Quraisy*, sesuai dengan tradisi sosial masyarakat Arab ketika itu. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan kembalinya sentimen kesukuan yang sebelumnya telah berhasil diredam melalui ajaran Islam. Pada akhirnya, Abu Bakar diangkat sebagai Khalifah pertama, meskipun penerimaan dari kaum Anshar diyakini tidak sepenuhnya lahir dari kerelaan penuh. Kondisi tersebut membentuk dinamika sosial baru, di mana persatuan umat sangat bergantung pada kemampuan Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan kelompok-kelompok yang sempat berbeda pendapat.

Pengaruh politik yang serupa juga tampak dalam pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Abu Bakar menunjuk Umar sebelum wafatnya, sehingga proses pemilihan tidak lagi melalui musyawarah yang luas, melainkan melalui penetapan langsung. Menurut analisis Henri Lammens, langkah tersebut menunjukkan adanya pengaruh kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kepemimpinan di tangan suku *Quraisy*. Selain itu, tindakan Abu Bakar juga dilakukan untuk mencegah munculnya konflik seperti yang terjadi pada peristiwa *Tsaqifah*. Secara keseluruhan, proses awal penunjukan khalifah memberikan dampak besar terhadap perkembangan politik dan sosial umat Islam. Mekanisme pengangkatan pemimpin pada masa itu membentuk pola awal sistem politik Islam, mempertegas dominasi *Quraisy*, meredakan ketegangan antarkelompok, dan menjadi dasar bagi struktur pemerintahan pada periode-periode selanjutnya (Hasna Amiroh Malda et al., 2025).

Perbedaan konseptual tentang hakikat kepemimpinan (imamah vs khilafah) menjadi titik fokal perselisihan. Kelompok yang kemudian berkembang menjadi pengikut Ali (yang menekankan aspek keturunan dan hak spiritual-institusional) menempatkan konsep Imamah (kepemimpinan yang memiliki dimensi otoritas spiritual dan hak turun-temurun dalam keluarga Ahlul Bait) sebagai inti legitimasi. Sementara kelompok lain menekankan legitimasi berdasarkan konsensus komunitas / pengakuan politik (prinsip yang menjadi dasar formasi khilafah awal). Perbedaan ini bukan hanya soal siapa pemimpin, tapi juga tentang sumber otoritas {keturunan vs konsensus} (zulkifli, 2013).

Perbedaan pandangan tersebut bertransformasi menjadi konflik politis ketika klaim-klaim kepemimpinan berhadapan dengan sumber daya, posisi berpengaruh, dan narasi legitimasi negara. Konflik-konflik seperti pemberontakan, perang saudara kecil, dan pergesekan politik berikutnya (mis. konflik yang memuncak pada peristiwa-peristiwa berikut generasi awal) memperkuat polarisasi dan mem-biotakkan identitas komunal yang bertahan lama (Abdullah AF et al., 2023).

Akibatnya, perbedaan awal tentang suksesi bereskalasi menjadi perpecahan sektarian (yang kelak dikenal sebagai Sunni-Syiah dengan berbagai turunan paham). Selain itu, ingatan historis dan narasi legitimasi (bagaimana setiap kelompok menceritakan kembali peristiwa Saqifah, kedudukan Ali, peristiwa Karbala, dsb.) berfungsi memperkokoh identitas dan justifikasi politik masing-masing kelompok. Narasi-narasi ini mengakar kuat di bidang teologi, hukum dan praktik sosial sehingga perpecahan yang awalnya bersifat politik menjadi perpecahan mazhab/komunitas yang juga memiliki dimensi keagamaan. Akhirnya, jelas bahwa perpecahan tidak semata-mata karena perselisihan teologis murni, melainkan interaksi antara klaim politik, struktur sosial, dan interpretasi teologis yang saling mempengaruhi hingga berdampak jangka panjang pada persatuan umat (Aprianti et al., 2025).

Krisis kepemimpinan yang terjadi segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu titik paling penting dalam perjalanan sejarah politik dan keagamaan Islam. Tidak adanya penunjukan pemimpin secara eksplisit oleh Nabi memunculkan perdebatan di kalangan sahabat mengenai siapa yang paling berhak menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin agama dan politik umat Islam. Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi konflik sosial, politik, dan teologis yang memiliki dampak jangka panjang.

Secara politik, perbedaan pandangan mengenai mekanisme suksesi melahirkan dua kubu utama: kelompok yang mendukung musyawarah sahabat sebagai dasar penetapan pemimpin, dan kelompok yang meyakini bahwa kepemimpinan harus berada di tangan keluarga Nabi (*Ahlul Bait*). Pertentangan ini menjadi awal terbentuknya *Sunni* dan *Syi'ah*, dua aliran terbesar dalam Islam yang berkembang hingga masa modern. Meskipun pada awalnya bersifat politis, perbedaan tersebut kemudian berubah menjadi perbedaan teologis, fiqh, dan praktik keagamaan.

Selain itu, konflik berkepanjangan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib menyebabkan munculnya kelompok *Khawarij*, yang menolak kedua belah pihak dan mengusung konsep kemurnian akidah serta pemberontakan terhadap pemimpin yang dianggap tidak adil.

Kelompok ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan konsep ekstremisme dalam sejarah Islam, terutama melalui doktrin takfir yang mereka kembangkan. Bahkan dalam beberapa gerakan radikal kontemporer, pola pikir *Khawarij* masih dapat dilihat dalam praktik dan pemikiran mereka.

Krisis kepemimpinan ini juga mempengaruhi perkembangan ilmu kalam, yaitu ilmu teologi Islam. Perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan memunculkan pertanyaan lebih besar tentang otoritas agama, kedudukan akal dan wahyu, serta konsep keadilan Tuhan. Dari sini lahir berbagai aliran teologi seperti *Mu'tazilah*, *Asy'ariyah*, dan *Maturidiyah* yang kemudian mewarnai pemikiran Islam selama berabad-abad. Perbedaan ini menjadi basis bagi perdebatan panjang antara kaum rasionalis dan tekstualis dalam sejarah intelektual Islam. Secara sosial, krisis kepemimpinan menyebabkan polarisasi antar kelompok umat Islam yang bertahan hingga kini. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, identitas politik semakin diperkuat melalui penggunaan legitimasi agama. Akibatnya, perbedaan awal yang bersifat politis berubah menjadi identitas komunal yang membentuk masyarakat Muslim di berbagai wilayah dunia. Dalam jangka panjang, perpecahan yang berawal dari krisis kepemimpinan pasca wafatnya Nabi tidak hanya menghasilkan sekte-sekte utama seperti Sunni, Syi'ah, dan Khawarij, tetapi juga berkontribusi pada munculnya berbagai mazhab fiqh dan teologi yang beragam. Keanekaragaman ini memperkaya tradisi intelektual Islam, namun pada saat yang sama juga menjadi sumber konflik internal yang terus muncul sepanjang sejarah.

D. Kesimpulan

Krisis kepemimpinan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Ketidadaan pernyataan eksplisit dari Nabi mengenai mekanisme dan sosok yang harus menggantikan kepemimpinannya menciptakan situasi politik yang sensitif dan penuh ketidakpastian. Dalam kondisi emosional yang masih diliputi duka, para sahabat menghadapi kebutuhan mendesak untuk menetapkan pemimpin baru demi menjaga kelangsungan umat, stabilitas sosial, dan kesinambungan misi dakwah. Perbedaan latar belakang, loyalitas tribal, dan pemahaman mengenai kriteria kepemimpinan kemudian memunculkan berbagai pandangan, terutama antara kelompok *Muhajirin* dan *Anshar*, yang berpuncak pada perdebatan di Saqifah Bani Sa'idah. Melalui proses musyawarah yang intens dan penuh dinamika, Abu Bakar ash-Shiddiq akhirnya terpilih sebagai *khalifah* pertama, menandai lahirnya institusi politik baru dalam Islam yang berfungsi mengatur urusan umat setelah masa kenabian.

Namun demikian, proses suksesi ini juga meninggalkan jejak perbedaan interpretasi mengenai legitimasi kepemimpinan. Sebagian sahabat dan kelompok masyarakat menilai bahwa pemimpin seharusnya berasal dari *Ahlul Bait* melalui Ali bin Abi Thalib, sementara kelompok lain menegaskan pentingnya konsensus komunitas (*ijma'*) sebagai dasar keabsahan kepemimpinan. Perbedaan konseptual ini berkembang melampaui persoalan politik praktis dan memasuki ranah teologis, sehingga membentuk fondasi lahirnya kelompok-kelompok seperti *Sunni*, *Syiah*, dan *Khawarij*. Konflik-konflik yang terjadi pada masa-masa berikutnya, termasuk pergolakan di masa *Khalifah* Ali, semakin memperlebar perbedaan tersebut dan membawa dampak mendalam terhadap penyusunan narasi sejarah serta diskursus teologi di era selanjutnya.

Dampak jangka panjang dari krisis ini tercermin dalam perkembangan ilmu kalam, fiqh, dan struktur sosial-politik umat Islam. Sebagaimana terlihat dalam sejarah, perpecahan yang awalnya bersifat politis kemudian terinstitusionalisasi menjadi identitas keagamaan yang berbeda-beda, masing-masing didukung oleh argumen teologis dan legitimasi historis yang terus dipelihara. Meskipun menghasilkan keragaman intelektual yang memperkaya tradisi keilmuan Islam, perbedaan ini juga menjadi sumber ketegangan internal yang memengaruhi relasi antar komunitas Muslim hingga masa modern.

Dengan demikian, krisis kepemimpinan pascawafat Nabi Muhammad SAW tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa politis sesaat, tetapi sebagai titik balik yang membentuk arah perkembangan Islam secara keseluruhan. Peristiwa ini menjadi dasar terbentuknya sistem kekhalifahan, mempengaruhi struktur legitimasi dalam kepemimpinan Islam, melahirkan beragam aliran pemikiran, serta membentuk identitas politik dan teologis umat Islam yang bertahan sepanjang sejarah.

E. Referensi

- Abdullah AF, Syamzan Syakur, & Susmihara. (2023). Melacak Akar Permasalahan Hubungan Antara Sunni dan Syi'ah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(4), 560–567. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.151>
- Aprianti, S., Amri, M., & Thalib, A. (2025). Sunni dan Syiah: Titik Perbedaan, Persentuhan, dan Kemungkinan Harmonisasinya. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 330–338. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3436>
- Hariato, Y. A. (2023). Kredibilitas Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Meredam Perpecahan Umat Islam pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 5(1), 69–88. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v5i1.253>
- Hasna Amiroh Malda, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Ais Surasa, & Ulummudin Ulummudin. (2025). Pengaruh Hukum Islam dan Dinamika Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Fase Mulkan Jabariyyah. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 34–52. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2133>
- Rahmatullah, M. (2014). *KEPEMIMPINAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ*. 4(September), 197–204.
- Saputra, H. (2019). Rekonsiliasi Pascasukses Kepemimpinan: Berkaca pada Penerapan Sistem Kekhalifahan Pertama dalam Islam dan Implementasinya pada Kehidupan Demokrasi Indonesia. *Maarif*, 14(1), 102–113. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.51>
- Subhani, Salamaton Raudhah, Sufian Hadi, Mustafa, & Maritsa Ulfa Khaira. (2023). 1816-Article Text-4269-1-10-20230216. *Journal Of Education*, 05(Analisis Sejarah Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW), 9460–9473. <http://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1816>
- Yani, A. (2022). *Khulafah Al- Rasyidun : Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar*. 33–44.
- Yunus, M. (2016). Konsepsi Politik Islam Klasik (Sukses Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' ArRasyidin). *Palapa*, 4(2), 72–84. <https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.25>
- zulkifli. (2013). SEJARAH KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN SYI'AH. *Jurnal Khatulistiwa*, 2(September), 21.